

Informasi Dasar

Disabilitas di Indonesia



Pendahuluan

Pemerintah Indonesia menjadikan inklusi disabilitas sebagai prioritas penting mengingat jumlah penyandang disabilitas di Indonesia yang mencapai lebih dari 23 juta orang (9 persen dari populasi Indonesia).¹ UU No. 8 Tahun 2016 menjadi landasan atas pengembangan Rencana Aksi Nasional yang menjelaskan tujuh tujuan strategis jangka panjang Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) ke dalam tujuan rencana pembangunan lima tahunan. Beberapa komitmen terkait rencana aksi tersebut adalah; peluang setara dan tidak diskriminatif untuk para penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dan melakukan usaha, sanksi bagi lembaga pemerintah dan bisnis yang tidak mengikuti persyaratan, serta kuota minimum untuk mempekerjakan penyandang disabilitas (sebesar 1 persen untuk pekerjaan di sektor swasta dan 2 persen untuk sektor pemerintah dan badan usaha milik negara). Perhatian pemerintah terhadap inklusi disabilitas sangat tepat dan penting dalam rangka menjamin pertumbuhan yang adil dan inklusif mengingat saat ini Indonesia masih tertinggal dari beberapa negara sejawat dalam indeks inklusi, dimana Indonesia berada di peringkat ke-115.² Rendahnya tingkat inklusi ini tercermin dari fakta pada rendahnya pencapaian pendidikan para penyandang disabilitas, tingkat kesehatan yang buruk, dan akses yang kurang ke layanan publik serta peluang ekonomi yang lebih kecil dibandingkan dengan orang bukan penyandang disabilitas.

Pengentasan terhadap kesenjangan inklusi akan membawa dampak sosial dan ekonomi positif yang akan berpotensi meningkatkan perdagangan alat bantu. Inklusi yang lebih baik tidak hanya berkaitan dengan kohesi sosial yang meningkat, namun juga berhubungan dengan perekonomian yang lebih produktif. Fakta global memperlihatkan bahwa ketidaksertaan penyandang disabilitas dalam perekonomian dapat membawa pengaruh negatif terhadap penurunan produk domestik bruto sebuah negara sebesar 3-7 persen.³

Kurangnya akses ke alat bantu bagi para penyandang disabilitas menjadi hambatan yang signifikan terhadap partisipasi sosial dan ekonomi para penyandang disabilitas. Penelitian teranyar memperkirakan, 60 persen orang dengan disabilitas sedang hingga berat di Indonesia tidak menggunakan alat bantu.⁴ Alat-alat bantu seperti, alat bantu dengar, kacamata, dan prostetik (alat bantu untuk anggota tubuh yang hilang) merupakan alat bantu yang tingkat pemenuhannya masih rendah. Ini dapat membuka peluang bagi perdagangan bilateral penting utamanya terhadap pemenuhan alat-alat bantu tersebut.⁵

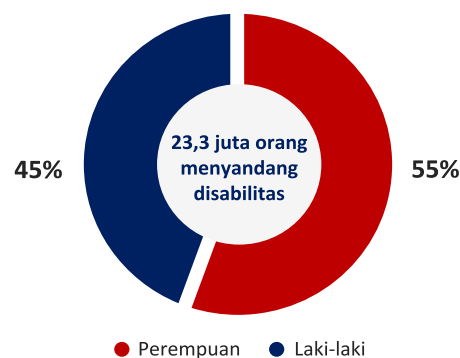
Angka prevalensi dan demografi disabilitas

Indonesia memiliki populasi penyandang disabilitas dalam jumlah besar. Diperkirakan ada 23,3 juta⁶ orang Indonesia yang merupakan penyandang disabilitas dengan hampir setengah dari jumlah tersebut (45,8 persen) memiliki jenis disabilitas lebih dari satu.⁷ Ini merupakan angka yang besar, sebagai perbandingan, jumlah total populasi Australia adalah 26,2 juta orang.⁸

Orang Indonesia yang menyandang disabilitas kebanyakan perempuan, berusia lebih tua dan hidup di pedesaan.

Jumlah perempuan penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 55.46 persen dari total populasi tenaga kerja

Gambar 1. Estimasi jumlah penyandang disabilitas di Indonesia (juta)



Sumber: Kalkulasi ILO. 2022 (menggunakan Sakernas 2020)

1 Sakernas, 2019

2 [2020 Inclusiveness Index: Measuring Global Inclusion and Marginality.](#)

3 World Bank. Disability Inclusion in Latin America and the Caribbean: A Path to Sustainable Development. 2021

4 BKF-Prospora, 2021

5 Penelitian Katalis yang akan datang mengenai Alat Kesehatan dan Teknologi Pendukung

6 Perlu diketahui bahwa ini merupakan perkiraan berdasarkan data Susenas 2018/2019. Jumlah terkini bervariasi menurut sumber data.

7 Susenas, 2018, 2019

8 <https://www.abs.gov.au/statistics/people/population>

penyangang disabilitas.⁹ Penyangang disabilitas di Indonesia juga cenderung berusia lebih tua, hampir 42 persennya berusia 60 tahun atau lebih, dan lebih dari setengah (51.3 persen) yang tinggal di daerah perkotaan.¹⁰ Sekitar 11,2 juta (48 persen) penyangang disabilitas berada di kelompok usia produktif, yaitu 19-59 tahun.

Gangguan pendengaran, gerak, dan penglihatan merupakan bentuk disabilitas paling lazim ditemui. Jumlah penyangang disabilitas terbanyak adalah disabilitas visual (11,29 persen), diikuti dengan disabilitas gerak (7,79 persen), dan disabilitas pendengaran (5,67 persen). Disabilitas jenis lain meliputi disabilitas gerak (tangan/jari) dan wicara.

Akses ke layanan penting dan alat bantu

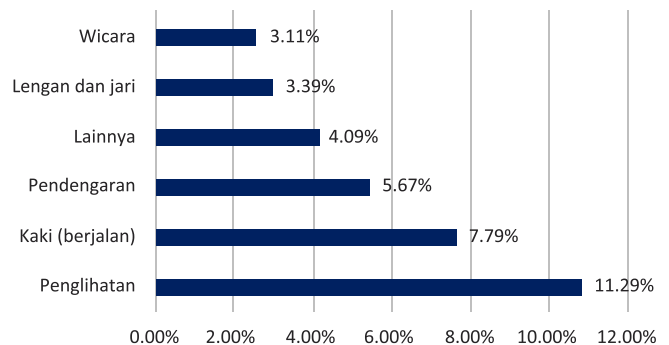
Meski berdekatan, penyangang disabilitas di Indonesia belum memiliki akses yang cukup ke layanan-layanan penting seperti pendidikan. Kurang dari setengah dari jumlah penyangang disabilitas di Indonesia hanya memiliki ijazah setingkat sekolah menengah pertama dan kurang dari sepertiganya yang menamatkan sekolah menengah atas. Pencapaian pendidikan bagi para penyangang disabilitas merupakan hal yang penting. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Bappenas memperlihatkan korelasi positif antara pendidikan dan status pekerjaan, dimana penyangang disabilitas yang menamatkan sekolah menengah atas berpeluang dua kali lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan penuh waktu permanen dengan gaji yang lebih baik. Mereka yang memiliki ijazah dengan kualifikasi lebih tinggi dari sekolah menengah berpeluang 3,5 – 4,5 kali lebih besar untuk memperoleh akses ke pekerjaan demikian daripada lulusan sekolah menengah pertama atau lebih rendah.¹¹

Penyangang disabilitas di Indonesia juga kurang memiliki akses ke skema jaminan sosial termasuk asuransi kesehatan. Jika dibandingkan dengan jumlah populasi nasional, tingkat kepemilikan asuransi kesehatan para penyangang disabilitas lebih rendah dimana 37,6 persen populasi penyangang disabilitas tidak memiliki asuransi kesehatan, sementara 34,1 persen populasi Indonesia tidak dijamin asuransi. Sementara itu, terkait dengan tantangan dalam mengakses layanan dasar, penyangang disabilitas cenderung lebih sedikit yang memiliki kartu identitas nasional atau dokumen lain yang dikeluarkan pemerintah seperti akta lahir.¹² Meskipun disabilitas merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, penyangang disabilitas

di Indonesia masih menghadapi stigma dan diskriminasi seperti yang terlihat dari rendahnya tingkat akses ke layanan dan peluang ekonomi.

Penggunaan alat bantu di kalangan penyangang disabilitas masih rendah. Penggunaan alat bantu di kalangan penyangang disabilitas masih rendah dan berbeda-beda di setiap jenis disabilitas. Sebanyak 80 persen dari orang dengan keterbatasan penglihatan menyatakan tidak memiliki akses ke kacamata dan 28 persennya melaporkan tidak memiliki akses ke tongkat bantu. Akses untuk mendapatkan alat bantu prostetik juga sangat rendah. Lebih dari 75 persen penyangang disabilitas yang dapat memanfaatkan alat bantu tidak dapat memperolehnya.¹³ Penyebab rendahnya tingkat penggunaan alat bantu adalah kurangnya kesadaran, biaya yang tinggi, keterbatasan produk dan kekurangan ahli terampil yang dapat meresepkan penggunaan alat bantu dan jasa yang sesuai serta yang dapat menawarkan bantuan khusus untuk layanan pemasangan dan perawatan alat bantu. Tabel 1 berikut memperlihatkan bahwa alat bantu dengar, kacamata dan alat bantu prostetik merupakan produk alat bantu dengan tingkat pemenuhan penggunaan alat yang belum terpenuhi.

Gambar 2. Distribusi (%) populasi penyangang disabilitas berdasar jenis disabilitas



Sumber: Kalkulasi ILO. 2022 (menggunakan Sakernas 2020)

Tabel 1. Kebutuhan alat bantu yang belum terpenuhi

Gangguan kesehatan	Alat bantu yang dibutuhkan	% kebutuhan tidak terpenuhi
Penglihatan	Kacamata	80%
	Tongkat untuk tunanetra	28%
Pendengaran	Alat bantu dengar	91%
Wicara	Bahasa isyarat	54%
Lengan dan jari	Prostetik	60%
Kaki (berjalan)	Prostetik	75%
	Kursi roda	24%
	Alat bantu jalan	28%

Sumber: Cameron dan Suarez, 2017, kalkulasi menggunakan data Susenas 2006

9 Kalkulasi ILO. 2022 (menggunakan Sakernas 2020)

10 ILO, 2022 (menggunakan Susenas 2020)

11 Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2021. Kajian Disabilitas, Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyangang Disabilitas Indonesia: Aspek Sosioekonomi dan Yuridis. Laporan Rekomendasi Kebijakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. BAPPENAS. Jakarta, Indonesia. UNDP. 2023. Fostering Disability Inclusion & Business Integrity in ASEAN. UNDP. Bangkok, Thailand.

12 Siyaranamual, Martin and Larasati, Dyah. 2020. Analisis tentang Kondisi Disabilitas: Tantangan dan Hambatan bagi Para Penyangang Disabilitas di Indonesia. TNP2K & Pemerintah Australia. Dapat diakses di <https://www.tnp2k.go.id> access on 29 July 2023

13 Cameron and Suarez, 2017, 'Disability in Indonesia', Disability-in-Indonesia.pdf (monash.edu)

Partisipasi angkatan kerja

Melihat tantangan terkait akses yang ada, tidak mengejutkan bahwa partisipasi penyandang disabilitas dalam pasar tenaga kerja rendah dan terkonsentrasi di sektor informal. Kurang dari setengah (46 persen) penyandang disabilitas berusia 15 tahun dan lebih berada di pasar tenaga kerja.¹⁴ Partisipasi perempuan penyandang disabilitas dalam pasar tenaga kerja bahkan berada pada tingkat yang lebih rendah lagi (34 persen), meskipun ini tidak berbeda dengan tren nasional dalam partisipasi angkatan kerja perempuan. Mayoritas (75,49 persen) angkatan kerja penyandang disabilitas bekerja di sektor informal. Pertanian (termasuk peternakan dan perikanan) dan kehutanan merupakan lapangan kerja terbesar bagi penyandang disabilitas. Perdagangan, restoran, dan hotel merupakan sumber pekerjaan lain bagi penyandang disabilitas. Terdapat juga tren peningkatan wirausaha di kalangan penyandang disabilitas. Dilaporkan pada tahun 2020, 58,25 persen penyandang disabilitas merupakan wiraswasta, jumlah ini meningkat hampir empat angka dari 54,66 persen pada tahun 2017.

Penyandang disabilitas kurang terkoneksi. Meskipun kepemilikan telepon seluler fluktuatif pada kelompok ini, kepemilikan telepon seluler para penyandang disabilitas lebih rendah (rata-rata sekitar 36,7 persen) dibandingkan pada orang yang bukan penyandang disabilitas (59,4 persen).¹⁵ Demikian pula, tingkat pemanfaatan internet bagi penyandang disabilitas lebih rendah. Pada tahun 2020, hanya 18,9 persen penyandang disabilitas yang terhubung ke internet. Tingkat konektivitas yang lebih rendah mempunyai implikasi penting terhadap peluang penyandang disabilitas untuk masuk ke angkatan kerja termasuk pasar tenaga kerja bebas (*gig economy*).

Penawaran dan permintaan alat bantu

Pasar alat bantu di Indonesia sangat besar dan diperkirakan akan terus tumbuh. Pada tahun 2023, pasar alat bantu diperkirakan bernilai USD 180-200 juta. Faktor-faktor seperti, peluncuran progresif program asuransi kesehatan komprehensif Pemerintah Indonesia yang dapat mencakup jaminan penuh pada tahun 2024 dan meningkatnya kesediaan masyarakat untuk mengeluarkan biaya perawatan kesehatan sendiri menunjukkan bahwa akan ada pertumbuhan permintaan yang berkelanjutan terhadap alat bantu.

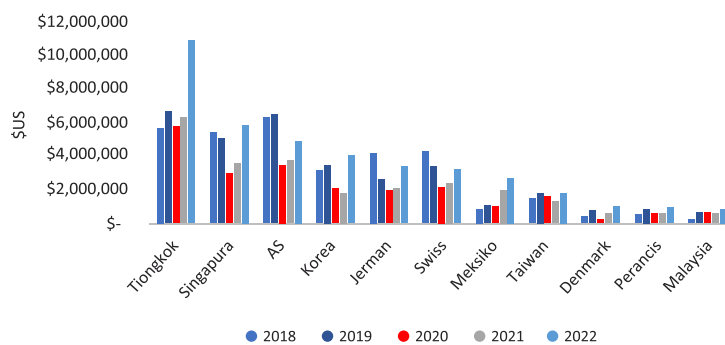
Aksesibilitas dan keterjangkauan merupakan hambatan utama dalam mengakses alat bantu. Perbandingan dengan negara-negara ASEAN dan Australia menunjukkan bahwa harga alat bantu di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara sejenis dan tidak terjangkau oleh semua masyarakat kecuali oleh 20 persen rumah tangga terkaya.¹⁶ Harga yang tinggi disebabkan karena sebagian besar produk alat bantu diimpor, baik sebagai bahan setengah jadi atau produk utuh dan dikenakan pajak impor sebesar

5-30 persen (tergantung kategori produk), di luar dari PPN sebesar 10 persen serta biaya pengiriman dan penanganan. Sebagian besar produk alat bantu juga dibuat atau diimpor oleh penyedia yang beroperasi di Pulau Jawa sehingga ini menimbulkan biaya transportasi tambahan untuk pemasangan dan pengiriman bagi para pelanggan di luar Jawa.

Selain pajak impor, persyaratan tingkat komponen dalam negeri juga berdampak pada pasokan produk alat bantu. Dalam upaya bersama untuk meningkatkan produksi peralatan medis dan produk alat bantu lokal, Pemerintah Indonesia mewajibkan hanya perangkat medis dan alat bantu produksi lokal yang bersertifikat dan memiliki setidaknya 40 persen kandungan lokal yang diizinkan masuk ke sistem pengadaan daring pemerintah.¹⁷ Produksi lokal sebagian terhambat oleh ketergantungan pada impor bahan setengah jadi yang sebagian besar berasal dari Tiongkok.

Tiongkok merupakan pemasok terbesar produk alat bantu ke Indonesia. Impor alat bantu dari Tiongkok mencapai seperempat dari keseluruhan impor alat bantu Indonesia pada tahun 2022 yang mencapai USD 10,9 juta. Impor dari Tiongkok telah meningkat pesat sebesar 16 persen sejak tahun 2018.¹⁸ Pemasok terbesar kedua adalah Singapura yang menyumbang 14 persen impor, diikuti oleh Amerika Serikat (11 persen), Korea (9 persen), Jerman (8 persen) dan Swiss (8 persen). Impor dari Australia tidak ada pada tahun 2022 namun mencapai puncaknya pada USD 13.000 pada tahun 2019.¹⁹

Gambar 3. Impor alat bantu Indonesia: 10 pemasok teratas, 2018-2022, USD



Sumber: Trade Map, 2023, menggunakan kode HS 9021

15 Subdirektorat Indikator Statistik, BPS. 2020. 'Indikator Kesejahteraan Rakyat 2020: Kesempatan Penyandang Disabilitas Terhadap Pendidikan dan Pekerjaan'.13 Source: Bappenas, 2021.

16 Prospera, 2023, "Analisis terkait Alat Bantu untuk Penyandang Disabilitas yang Dijamin JKN: temuan awal".

17 Pada praktiknya, jika permintaan dalam negeri lebih besar dibandingkan pasokan lokal, impor diperbolehkan melalui mekanisme 'unfreeze'.

18 HS 9021 – kategori ini secara umum mencakup alat bantu dengar, anggota badan buatan, alat pacu jantung, alat ortopedi, dan peralatan yang dapat ditanam/dipasang pada tubuh.¹⁷ Trade

19 Trade Map, 2023, using HS code 9021

Kesimpulan: peluang dan tantangan

Kesadaran Pemerintah dan bisnis Indonesia terhadap pentingnya inklusi sosial ekonomi bagi penyandang disabilitas semakin meningkat. Peningkatan kesadaran dan komitmen ini terbukti dari adanya pengesahan UU dan rencana aksi nasional terkait penyandang disabilitas. Tindakan ini merupakan hal yang tepat karena penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi hambatan struktural dan sosial yang signifikan untuk berpartisipasi secara penuh dalam bidang ekonomi dan sosial. Rendahnya akses yang dimiliki penyandang disabilitas terhadap layanan-layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, membawa dampak negatif jangka panjang yang signifikan terhadap kehidupan dan mata pencaharian para penyandang disabilitas serta keluarga

mereka. Ini mengakibatkan tingkat kesehatan, pendidikan dan perekonomian para penyandang disabilitas lebih buruk dibandingkan dengan orang-orang yang bukan penyandang disabilitas.

Meningkatkan akses terhadap alat bantu dan layanan-layanan pendukung merupakan salah satu cara Pemerintah Indonesia dalam mengurangi hambatan dan memfasilitasi tercapainya inklusi yang lebih besar bagi para penyandang disabilitas. Masih ada kebutuhan besar akan alat bantu yang belum terpenuhi. Pemerintah Indonesia dapat mewujudkan partisipasi penyandang disabilitas yang lebih besar dan adil sekaligus memanfaatkan peluang perdagangan yang signifikan melalui penanganan permasalahan akses, keterjangkauan, dan kualitas alat bantu.



Kadar pulangan ekonomi dari inklusi

Peningkatan partisipasi dari para penyandang disabilitas pada angkatan kerja diperkirakan dapat membawa dampak positif terhadap PDB. Lebih lanjut, bermunculan bukti dari negara-negara lain yang mendukung argumentasi bahwa inklusi para penyandang disabilitas dapat mendorong pertumbuhan bisnis.



Di Tiongkok, setiap tambahan tahun sekolah yang diterima oleh penyandang disabilitas berkontribusi pada kenaikan upah, 5 persen untuk daerah pedesaan dan 8 persen di daerah perkotaan.



Di Nepal, keikutsertaan penyandang disabilitas sensorik atau fisik ke dalam pendidikan menyebabkan kenaikan upah sekitar 20 persen.



Di Pakistan, tindakan rehabilitasi bagi orang-orang dengan kebutaan yang tidak dapat disembuhkan menghasilkan peningkatan bruto gabungan pendapatan rumah tangga sebesar USD 71,8 juta per tahun.

Sumber: Banks, Morgon Lena and Polack, Sarah. *The Economic Costs of Exclusion and Gains of Inclusion of People with Disabilities: International Centre for Evidence in Disability, London School of Hygiene & Tropical Medicine. CBM.*

Poin-poin penting

- Ada lebih dari 23 juta orang Indonesia yang merupakan penyandang disabilitas (2022).
- Inklusi disabilitas menjadi prioritas Pemerintah Indonesia dan diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016.
- Penyandang disabilitas di Indonesia kebanyakan perempuan, berusia lebih tua dan tinggal di perkotaan.
- Penyandang disabilitas Indonesia memiliki pencapaian pendidikan lebih rendah, tingkat kesehatan buruk, dan akses yang kurang ke layanan publik serta peluang ekonomi lebih kecil.
- Sebagian besar penyandang disabilitas tidak bisa mengakses alat bantu seperti, kacamata, alat bantu dengar, dan kursi roda.
- Perbandingan lintas negara dengan negara-negara ASEAN dan Australia menunjukkan bahwa harga alat bantu di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara sejenis dan tidak terjangkau oleh semua masyarakat kecuali oleh 20 persen rumah tangga terkaya.
- Pasar Indonesia untuk alat bantu diperkirakan bernilai USD 180-200 juta (2023).
- Ketidaksertaan penyandang disabilitas dapat memberi dampak negatif pada penurunan PDB sebesar 3-7 persen.
- Gangguan penglihatan, gerak, dan pendengaran merupakan jenis disabilitas paling lazim.

Sebagai sebuah program yang dirancang untuk mendorong kerjasama perdagangan bilateral antara Indonesia dan Australia serta yang mengedepankan kontribusi terhadap inklusi disabilitas serta kesetaraan gender di bawah perjanjian kemitran ekonomi komprehensif Indonesia dan Australia (IA-CEPA), Katalis tengah mengerjakan penelitian tentang perdagangan alat-alat kesehatan dan alat bantu bagi penyandang disabilitas serta memfasilitasi pelaksanaan serangkaian dialog publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran seputar peluang dan tantangan terkait.

Alamat: Tower 2, Lantai 25,
International Financial Centre (IFC),
Jl. Jend. Sudirman Kav 22-23,
Jakarta 12920, Indonesia
Email: info@iacepa-katalis.org
Website: iacepa-katalis.org



IA-CEPA ECP Katalis



Katalis IA